



Perwakilan BPKP
Provinsi Bali

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023



Nomor: S- 59/PW22/6/2023
Tanggal 20 Januari 2023

 (0361) 246772

 bali@bpkp.go.id



**PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Masykur
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) serta Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Yusuf Ateh

Muhammad Masykur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.168,00
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136.270,00
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	100
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	8
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	9
		6.6	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/ Kota	4
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10
		6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		7.7	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80

Kegiatan	Anggaran
1 Pengawasan Pembangunan	Rp 3.389.116.000
2 Dukungan Manajemen Internal	Rp 23.070.563.000
	Rp 26.459.679.000

Kepala BPKP

Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Yusuf Ateh

Jakarta, 20 Januari 2023
Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Masykur



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN**

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	D204	-	-	✓	-
2	A.1.d	Kinerja Pendidikan Tinggi	D204	-	-	✓	-
3	A.2.a	Sistem Kesehatan Nasional	D203	-	✓	-	-
4	A.2.b	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	D203	-	✓	-	-
5	A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	D203	-	✓	-	-
6	A.2.d	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	D203	-	✓	-	-
7	A.2.e	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	D203	-	✓	-	-
8	A.2.g	Akuntabilitas penanganan Covid-19	D203	✓	-	-	-
9	A.2.h	Percepatan Penurunan Stunting	D204	-	✓	-	-
10	A.2.i	Skema Kesehatan Adaptif	D203	-	✓	-	-
11	A.3.a	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	D205	✓	-	✓	-
12	A.3.b	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	D203	✓	✓	✓	✓
13	A.3.d	Implementasi Bansos APBD	D302	-	-	-	✓
14	A.3.e	Implementasi Bansos APBDesa	D303	-	-	-	✓
15	A.3.f	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	D203	-	-	-	✓
16	B.1.a	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	D103	-	✓	-	✓
17	B.1.b	Infrastruktur SPAM	D103	-	✓	-	✓
18	B.1.c	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	D105	-	✓	-	✓
19	B.2.a	Pembangunan Jalan dan Jembatan	D105	-	✓	-	✓
20	B.2.d	Pembangunan Bandara	D103	-	✓	-	✓
21	B.2.e	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	D103	-	✓	-	✓
22	B.3.a	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	D204	-	✓	-	✓
23	B.3.b	Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional	D204	✓	-	-	-
24	B.3.c	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	D205	✓	-	-	-
25	C.2.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	D301	✓	-	-	-
26	C.2.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	D301	✓	✓	✓	✓
27	C.2.c	Optimalisasi PAD	D301	-	✓	-	-
28	C.2.d	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	D301	-	✓	-	-
29	C.2.e	Efektivitas Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)	D302	-	-	✓	-
30	C.2.g	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	D302	✓	✓	✓	✓
31	C.3.a	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	D303	✓	-	-	-
32	C.3.b	Akuntabilitas Keuangan Desa	D303	✓	✓	✓	✓
33	C.3.c	Akuntabilitas Aset Desa	D303	-	✓	-	-
34	C.4.a	BUMN	D401	-	✓	-	-
35	C.4.b	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	D405	-	✓	-	-
36	C.4.c	RI IMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	D403	-	✓	-	-



37	C.4.d	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	D405	-	✓	-	-
38	C.4.e	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	D405	-	✓	-	-
39	D.2.a	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	D104	✓	-	-	-
40	D.2.b	Akses Permodalan UMKM	D104	✓	-	-	-
41	D.3.a	P3DN	D504	✓	✓	✓	✓
42	D.3.b	Kemudahan Perizinan Berusaha	D101	-	-	✓	-
43	D.4.a	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	D104	✓	-	-	-
44	D.4.b	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	D104	✓	-	-	-
45	D.4.c	Dukungan Pengembangan Pariwisata	D104	✓	-	-	-
46	E.1.a	Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional	D501	-	-	✓	-
47	E.1.b	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	D501	-	-	✓	-
48	E.1.c	Tata Kelola Pupuk Nasional	D501	-	-	✓	-
49	E.1.d	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	D501	-	-	✓	-
50	E.1.e	Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional	D501	-	-	✓	-
51	E.1.f	Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	D501	-	-	✓	-
52	E.1.g	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan	D501	-	-	✓	-
53	E.1.h	Penanggulangan Hama dan Penyakit	D501	-	-	✓	-
54	E.3.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	D502	-	-	✓	-
55	E.3.b	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	D302	-	-	✓	-
56	E.3.c	Peningkatan Kualitas, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan	D502	-	-	✓	-
57	G.1.a	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	D304	-	-	-	✓
58	G.1.b	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	D304	✓	✓	✓	✓
59	G.1.c	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	D304	-	-	-	✓
60	G.1.e	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	D504	✓	-	✓	-
61	G.1.g	Manajemen Risiko Badan Usaha	D403	-	✓	-	✓
62	G.2.d	Reforma Agraria	D501	✓	-	-	-
63	G.3.a	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	D202	✓	-	-	-
64	G.3.b	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	D504	-	✓	✓	✓
65	G.3.c	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	D201	-	✓	-	✓

Jakarta, 20 Januari 2023
Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Masykur
NIP. 19640227 198402 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH**

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengelolaan Sampah Provinsi Bali	D.1.2	-	-	-	✓
2	PEMBANGUNAN EKONOMI	Program Transformasi Ekonomi Bali Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulan	D.1.3	-	✓	-	-

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Masykur
NIP. 19640227 198402 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik